



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/1210/AA.05/2018
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

31 Desember 2018

Yth. Walikota Dumai

di

Dumai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi Pemerintah Kota Dumai mendapat nilai **58,46** atau dengan predikat penilaian "**CC**". Hasil evaluasi secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan BPKP. Agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar menjadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan



Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Gubernur Riau